

**EVALUASI KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN COVID-19
(Suatu Studi di Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)**

Sri Kasiami

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

Email : srikasiami@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the evaluation of health protocol policies in the prevention and control of Covid-19 in the Sub-District of Sumbang. The focus of this research is on the general exploration of researchers to obtain a comprehensive picture that is still at the surface stage of the Covid-19 situation in the Sub-District of Sumbang. The method used is descriptive research and uses qualitative data analysis techniques. The theory used to evaluate the application of health protocols in the prevention and control of Covid-19 is the theory of evaluation types according to Dunn. The results of this study indicate that the implementation of the policies stated in the Regent's Regulation Number 38 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Efforts to Prevent and Control Covid-19 has not been optimal. This is evidenced by the victims of the spread of Covid-19 due to the residents of the Sub-District who have not implemented and obeyed the regulations that have been handed down by the Regional Government. In this study, it appears that the implementation is still lacking.

Keywords: Policy Evaluation, Effectiveness, Efficiency

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui evaluasi kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kelurahan Sumbang. Fokus penelitian ini adalah pada penjelajahan umum peneliti untuk memperoleh gambaran menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi Covid-19 di Kelurahan Sumbang. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 adalah teori tipe-tipe evaluasi menurut Dunn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan yang tertera pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 belum optimal. Hal ini, dibuktikan dengan adanya korban penyebaran Covid-19 akibat warga Kelurahan Sumbang belum menjalankan dan mentaati peraturan yang telah diturunkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini tampak pelaksanaannya masih kurang.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Efektivitas, Efisiensi

PENDAHULUAN

Evaluasi adalah serangkaian proses kegiatan dalam bentuk penilaian untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas sebagai keberhasilan program atau proyek. Kebijakan merupakan konsep dan asas sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan di sebuah organisasi seperti Pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah memfokuskan pada tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Tahun 2020 Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19. Penyebaran Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020, pemerintah menghimbau bahwaannya masyarakat untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19. Kasus penyebaran Covid-19 pada tahun 2020 terus bertambah tiap hari. Khususnya, di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan upaya dan langkah-langkah melalui kebijakan.

Kelurahan Sumbang sebagai Pemerintah terkecil di Kabupaten Bojonegoro. Covid-19 (SATGAS COVID-19) guna menyampaikan informasi kepada masyarakat di tiap Rukun Tetangga (RT) agar menaati peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah supaya menghindari penyebaran luas Covid-19. Pembentukan Gugus Tugas Covid-19 atau Satuan Petugas Covid-19 di Kelurahan Sumbang dimulai sejak diturunkan “Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/107/KEP/412.013/2020 Tentang Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Bojonegoro” pada tanggal 20 Maret 2020.

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/107/KEP/412.013/2020 Tentang Gugus Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

(Covid-19) di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan kebijakan kembali yaitu “Peraturan Pemerintah Bojonegoro No. 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro” pada tanggal 18 September 2020.

Posko Tanggap Darurat Bencana Non Alam Virus Corona sudah berajalan. Namun, masih ada warga dari Kelurahan Sumbang yang meninggal antara lain korban pertama seorang lansia meninggal pada tanggal 23 Mei 2020. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa program yang telah ada belum maksimal dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan lebih dalam lagi dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan penerapan protokol kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan Covid-19 di kelurahan Sumbang dengan teori tipe-tipe evaluasi menurut Dunn yakni: 1) Efektifitas, 2)Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Perataan, 5) Responsifitas 6) Ketepatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sumbang Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini ialah 1) Efektifitas, 2)Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Perataan, 5) Responsifitas, 6)Ketepatan. informan penelitian menggunakan teknik *purposive and snowball sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 20 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif *Model miles and Huberman*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*” (Sugiyono dalam Suprastiyo, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Beberapa warga belum paham fungsi dari 3 M yaitu; lalai menggunakan masker, lalai mencuci tangan dan lalai menjaga jarak. Adanya warga yang terkena dampak dari Covid-19 ditandai dengan adanya warga yang diisolasi, sembuh dan ada yang korban meninggal di beberapa RT. warga yang terpapar penyebaran Covid-19; karena belum paham fungsi dari 3 M yaitu; lalai menggunakan masker, lalai mencuci tangan dan lalai menjaga jarak sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah Bojonegoro Nomor. 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

2. Efisiensi

Kelurahan Sumbang; sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat di tiap Rukun Tetangga (RT) agar mentaati peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Satuan Tugas Covid-19 sebagai wadah pengendalian penyebaran Covid-19. Pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19. Di Kelurahan Sumbang memiliki program yakni pembagian tugas tiap wilayah RT melalui Gugus Tugas Covid-19 atau Satuan Tugas Covid-19 sebagai wadah pengendalian penyebaran Covid-19

3. Kecukupan

Mendirikan “Posko Tanggap Darurat Bencana Non Alam Virus Corona” di setiap RT. Mengarahkan dengan cara mensosialisasikan kepada warga Kelurahan Sumbang mengenai kebijakan protokol kesehatan Covid-19. Program Kelurahan Sumbang mendirikan

posko “Tanggap Darurat Bencana Non Alam Virus Corona” di tiap wilayah RT. Ketua RT sebagai penanggungjawab; perannya mengarahkan dengan cara mensosialisasikan kepada warga Kelurahan Sumbang mengenai kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah Bojonegoro No. 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro.

4. Perataan

Pemerataan biaya yang didistribusikan lewat Kelurahan Sumbang; didapatkan dari Pemerintah Daerah untuk biaya pembuatan spanduk, biaya alat cuci tangan dan lainnya. Sebagainya tujuan agar program yang ada di Kelurahan Sumbang dapat berjalan dengan baik. Pemerataan biaya yang didistribusikan lewat Kelurahan Sumbang; didapatkan Pemerintah Daerah dari APBD untuk biaya pembuatan spanduk, biaya alat cuci tangan dan lainnya telah dipasang dan ditempatkan tiap wilayah RT. Hal ini, sebagai tujuan agar program berjalan dengan baik.

5. Responsivitas

Adanya pertemuan per orang dan kelompok yang dipimpin oleh Ketua RT sebagai Satuan Tugas Covid-19 untuk mengarahkan warga mentaati protokol Covid-19. Ada faktor-faktor pendukung dan penghambat sehingga beberapa warga di wilayah RT terkena dampak penyebaran dan penularan Covid-19; selain warga yang kurang mantaati kebijakan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah Bojonegoro Nomor. 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan

dan Pengendalian Covid-19. Faktir pendukung dan penghambat kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 yakni 1) Ekonomi lemah, 2) Ekonomi menengah. Faktor pendukung dari warga ekonomi lemah; warga mendapatkan bantuan sembako dari Pemerintah Daerah. Dari segi ekonomi menengah; warga memandang aturan yang dikeluarkan Pemerintah membantu mereka. Sehingga keluarga mereka untuk sementara terhindar dari penyebaran Covid-19.

Faktor penghambat dari warga ekonomi lemah; warga menghargai aturan yang dikeluarkan Pemerintah. Namun, faktor ekonomi (kebutuhan sehari-hari) yang menjadikan warga Kelurahan Sumbang lalai untuk mentaati protokol kesehatan Covid-19 karena warga harus ke luar rumah. Dari warga ekonomi menengah; pada umumnya yang ekonominya kelas menengah adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengusaha. Sehingga dalam menjalankan peraturan Pemerintah terkadang lalai dalam pelaksanaannya. Jadi, dalam menjalankannya kurang maksimal.

6. Ketepatan

Pendekatan per keluarga untuk mengurangi korban Covid-19. Dalam pengevaluasian kebijakan yakni transparansi tiap, satuan tugas Covid-19 di setiap RT terbatas pada waktu di luar jam kerja serta belum jelasnya struktur organisasi RT dan seksi-seksinya. Terdapat peran satuan tugas Covid-19 yakni: realisasi oprasional satuan tuugas covid-19 ditiap RT sudah berjalan, namun trasparasi tiap RT memiliki perbedaan; pelayanan Gugus Tugas Covid-19 atau Satuan Tugas Covid-19 di setiap RT terbatas pada waktu di luar jam kerja. Mengingat mayoritas para petugas RT adalah ASN dari kantor-kantor non Pemerintah. Di sinilah salah satu faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan

Satuan Tugas Covid-19 di tingkat RT; serta faktor birokrasi di mana kejelasan struktur organisasi RT dan seksi-seksinya penuh dengan kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab.

SIMPULAN

1. Warga yang terpapar penyebaran Covid-19; karena belum paham fungsi dari 3 M yaitu; lalai menggunakan masker, lalai mencuci tangan dan lalai menjaga jarak sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah Bojonegoro Nomor. 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
2. Kelurahan Sumbang memiliki program yakni pembagian tugas tiap wilayah RT melalui Satuan Tugas Covid-19 sebagai wadah pengendalian penyebaran Covid-19.
3. Program Kelurahan Sumbang mendirikan posko “Tanggap Darurat Bencana Non Alam Virus Corona” di tiap wilayah RT. Ketua RT sebagai penanggungjawab; perannya mengarahkan dengan cara mensosialisasikan kepada warga Kelurahan Sumbang mengenai kebijakan Pemerintah daerah.
4. Pemerataan biaya yang didistribusikan lewat Kelurahan Sumbang; didapatkan Pemerintah Daerah dari APBD untuk biaya pembuatan spanduk, biaya alat cuci tangan dan lainnya telah dipasang dan ditempatkan tiap wilayah RT. Hal ini, sebagai tujuan agar program berjalan dengan baik .
5. Adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat sehingga ada wilayah RT yang terkena dampak Covid-19. Faktor pendukung dari warga ekonomi lemah; warga mendapatkan bantuan sembako dari Pemerintah Daerah. Dari segi ekonomi menengah; warga memandang aturan yang dikeluarkan Pemerintah membantu mereka. Sehingga keluarga

mereka untuk sementara terhindar dari penyebaran Covid-19.

6. Realisasi oprasional Satuan Tugas Covid-19 di tiap RT sudah berjalan. Namun, transparansi tiap RT memiliki perbedaan realisasi pelaksanaan forum pertemuan atau pendekatan keluarga tiap RT tidak sama. Pendekatan keluarga oleh RT untuk tetap disiplin menggunakan dan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 yakni 3 M. Namun, hasilnya tetap berbeda. Kedua, pelayanan Satuan Tugas Covid-19 di setiap RT terbatas pada waktu di luar jam kerja. Mengingat mayoritas para petugas RT adalah ASN dari kantorkantor non Pemerintah. Di sinilah salah satu faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan Satuan Tugas Covid-19 di tingkat RT. Kemudian, ketiga faktor birokrasi di mana kejelasan struktur organisasi RT dan seksi-seksinya penuh dengan kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F Stoner James dkk, *Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia*, PT.Prehanlindo, Jakarta, 1996.
- Alexander Phuk Tjilen, *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*,Nusa Media, Ujung Berung, 2019.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian, Pustaka Belajar*, Yogyakarta, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Nur Rohim Yunus & Annisa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antusiasipasi Penyebaran corona virus Covid-19*, 7 (3), 227-238, DOI : 10.15408/sjbs.v7i3.15083, 2020.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor. 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bojonegoro.
- Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 Di Tempat Dan Fasilitas Umum Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Prijambodo, *Monitoring dan Evaluasi*, Cetakan ke-1, IPB PressBogor,2014
- Riant Nugroho, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009.
- Riant Nugroho, *Public Policy*,Edisi 3, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Edisi Kedua, Alfabeta, Bandung, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2012. Sugiyono, *Statistiska Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Suprastiyo, A. (2020). *Quality Of Birth Certificate Management Services in the Department of Population and Civil Registration Bojonegoro District*.
- Zahrotunnimah, *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia*, 7 (3), 247-260, DOI : 10.15408/sjbs.v7i3.15103, 202